

Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

ENDANG PUJATI

10200114045

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endang Pujiati
Nim : 10200114045
Tempat /Tgl. Lahir : Sidomukti, 14 April 1997
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)”** adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campuran tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 19 Oktober 2018

Penyusun

Endang Pujiati
Nim.10200114045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)", yang disusun oleh Endang Pujiati, NIM: 10200114045, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 M, bertepatan 8 Rabiul Awal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 21 November 2018 M

13 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Usman, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Nip: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala limpahan kasih sayang beserta segala nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)”** dapat di selesaikan. Adapun skripsi ini ditulis sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, untuk itu dengan segala rasa cinta, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sugiono B dan Ibunda Sri Nur Asiah atas dukungan moral serta finansial yang diberikan selama ini sekaligus sebagai motivator terbesar dalam penyusunan skripsi ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a, olehnya itu selanjutnya terimakasih dengan segala rasa hormat disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar beserta ibu Dr. Kurniati S. Ag., M. Hi. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Usman. M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Subehan Khalik S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Keluarga tercinta Dani Prasetyo, Riana Dewi, Abdul Whid, atas motivasi dan dukungan yang diberikan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan saya di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2014, terkhusus kelas HPK A 014, teman-teman seperjuangan KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 58, khususnya posko 8 Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, teman-teman PMII dan AlDebA. Oleh karena motivasi, empati, inspirasi dan kontribusi yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang sedikit banyak berkontribusi atas penulisan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dimungkinkan disebutkan satu persatu.

Besar harapan agar skripsi ini dapat berimplikasi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia, baik dalam kajian teori maupun praktisnya. Dalam skripsi ini disadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah swt. menilai kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Aamiin.

Samata, 19 oktober 2018

Penulis,

Endang Pujiati

Nim.10200114045

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-19
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI.....	20-30
A. Pengertian Asuransi.....	20
B. Tujuan Asuransi	25
C. Prinsip Dasar Asuransi	26
D. Syarat-Syarat Sah Asuransi.....	28
BAB III ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM.....	31-54
A. Prinsip Umum Muamalah.....	31
B. Dasar Hukum Asuransi dalam Islam.....	43
C. Hukum Asuransi dalam Islam	49

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ASURANSI.....	55-86
A. Asas Hukum Perlindungan Asuransi.....	55
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	62
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Asuransi	80
BAB V PENUTUP.....	87-89
A. Kesimpulan.....	87
B. Implikasi Penelitian.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fat ah</i>	a	a
	<i>kasrah</i>	i	i
	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ	<i>fat ah</i> dan <i>y '</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fat ah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... إ ...	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y '</i>		a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>y '</i>		i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : yam tu

4. *T ' marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rau ah al-a f l
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-mad nah al-f ilah
 الْحِكْمَةُ : al- ikmah

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabban
 نَجِّنَا : najjain
 الْحَقَّ : al- aqq
 نَعْمَ : nu“ima
 عُدُّوْا : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi .

Contoh:

عَلِيّ : 'Al (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَدُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمُورٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

الله d null h بالله bill h

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله *hum f ra matill h*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan: Za d, Na r mid Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>sub nah wa ta' l</i>
saw.	=	<i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sal m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Endang Pujiati
NIM : 10200114045
Judul : Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)

Penelitian ini berfokus pada kedudukan asuransi dalam hukum Islam dengan pokok masalah adalah bagaimanakah kedudukan asuransi dalam telaah berdasarkan hukum Islam? Yang kemudian dijabarkan ke beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana hukum asuransi dalam perspektif hukum Islam?, 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi dalam perspektif hukum Islam?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum Islam. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari data-data yang orisinil (buku harian, laporan, ataupun catatan khusus) sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada (buku, jurnal, maupun laporan penelitian terdahulu).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum asuransi dalam perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan (halal), sebab tidak ada dalil yang melarang keberadaannya serta prinsip-prinsip hukum asuransi seperti prinsip halal, prinsip masalah, prinsip ibadah dan prinsip kerjasama tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Prinsip-prinsip itu ditempatkan sebagai syarat sahnya akad termasuk syarat yang diakui, bukan syarat yang bertentangan dengan akad (*mulghah*). Justru keberadaannya itulah sebagai alat untuk menghilangkan praktik-praktik bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti judi, *gharar*, penipuan, riba dan lain sebagainya. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi dalam hukum Islam yakni dengan cara memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia yang telah ada dalam aturan syara' yakni pertama, semua manusia harus menghormati hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak boleh melanggarnya. Kedua, pemilik hak itu juga tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Diharapkan agar memberikan pemahaman bagi para pelaku perasuransian bahwa asuransi bukanlah hal yang dilarang (haram). Namun demikian, juga harus memepertimbangkan segala aspek teknisnya dengan nilai-nilai keislaman, sehingga lebih bisa diterima oleh umat Islam. Bisnis dalam Islam bukan semata untuk mencapai keuntungan dunia semata, tetapi juga keuntungan akhirat. 2) Penelitian ini diharapkan agar masyarakat atau peserta asuransi harus benar-benar cermat dalam mengetahui apa hak dan kewajiban ketika akan, saat, dan setelah mengadakan suatu perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi agar tidak terjadi kerugian dan penyesalan di kemudian hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki dalam menata kehidupan yang lebih baik di dunia sebagai sarana mencapai kehidupan yang ideal (terbaik) di akhirat. Konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah meraih kedamaian dan kebahagiaan hidup duniawi menjadi cermin bagi jaminan akan terwujudnya cita-cita yang lebih sempurna tentang kehidupan ukhwari, atau dengan kata lain semnagat memaksimalkan kehidupan dunia dengan berdasarkan tuntutan wahyu diyakini akan mengantar seseorang mendapat kehidupan sempurna di akhirat.¹

Disamping aspek diatas, hukum Islam juga tidak mengesampingkan apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum mempunyai peluang dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Sedang disisi lain, perkembangan masyarakat mempunyai laju kecepatan yang kadang kala tidak terkejar oleh hukum itu sendiri. Keberadaan hukum tidak jarang tertinggal di belakang dan berlari ditengah-tengah mengejar ketertinggalan tersebut. Akibatnya, posisi hukum bisa diprediksikan selangkah lebih di belakang dibanding dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Bahkan jarang sekali posisi hukum itu sebagai pemimpin di depan, sebagai penentu, dan pengatur kebijakan dalam sebuah masyarakat. Apalagi perkembangan masyarakat suatu ketika dapat mengalami loncatan kedepan yang

¹Urbanus Uma, *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori dan Praktik Asuransi Syariah di Indoneisa* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

tidak bisa diprediksikan oleh hukum.² Fenomena diatas merupakan realita nyata yang terjadi sekarang ditengah masyarakat. Bahwa kehadiran aktivitas ekonomi berbasis asuransi juga menjadikan hukum Islam tatkala memasuki masa modern.

Kehadiran lembaga ekonomi syariah tidak dipahami sekedar sebagai lembaga alternatif dari praktek lembaga ekonomi konvensional yang ada, melainkan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat muslim untuk bermitra dengan lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Praktek lembaga ekonomi dan keuangan syariah melalui pendekatan kritis dan integratif akan menuju kepada pengembangan sistem ekonomi Islam yang bukan saja komprehensif tetapi juga secara universal. Paradigma dari ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk menata kehidupan yang lebih baik di dunia sebagai sarana mencapai kehidupan yang baik. Berdasarkan kerangka ideologi tersebut maka perilaku hidup seorang muslim tidak dijalankan dengan menghalalkan segala cara, akan tetapi perilaku hidup yang dibangun dengan motivasi amal shaleh yaitu perilaku yang mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan

²Yusuf al-Qhardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mantik, 2000), h. 3.

³Urbanus Uma, *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori dan Praktik Asuransi Syariah di Indoneisa*, h. 9.

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak terduga.⁴

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern.⁵ Bersamaan dengan semakin berkembangnya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat, maka banyak pula tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrument dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas dipabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya, di samping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi.⁶

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa lepas dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia.⁷ Secara historis fenomena diatas sudah bersama dengan adanya manusia. Hal ini menguatkan asuransi yang didalamnya melibatkan kelompok

⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 246.

⁵Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 49.

⁶Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern* (Cet. I; Jakarta: Lentera Baristama, 1999), h. 3.

⁷Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 7.

sosial telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggungan antara anggota kelompok.

Akan tetapi asuransi dalam masa dewasa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni terhadap semangat tolong menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern, disamping lembaga perbankan. Kebanyakan dalam masa kini konsep tolong menolong telah terbelenggu dalam jurang kenistaan dan telah diganti dengan keserakahan oleh manusia-manusia.⁸

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tepat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.⁹

Namun pada praktiknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masalah terbesar pada asuransi adalah pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Demikian juga yang dapat melemahkan posisi tertanggung, masalah ganti rugi, selama ini merasa kesulitan

⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 10.

⁹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 28.

untuk mencari keadilan dan mencari keberpihakan dari instansi pemerintah. Fenomena tersebut merupakan persoalan tertanggung dan hak-haknya, dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung bila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya yang selama ini masih sangat memprihatinkan dan semua itu diperlukan perlindungan hak-hak bagi tertanggung.

Dalam hal ini, hukum Islam mengemban misi untuk melakukan sebuah proyek Islamisasi ataupun menggali nilai-nilai yang ada dalam Alquran dan Sunnah Rasul dalam membentuk sebuah perangkat asuransi modern yang selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Disinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip pernyataan Nejatullah Sidiqqi, bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong menolong, seperti apa yang terjadi diawal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong menolong sebagai unsur utama didalamnya.¹⁰ Hal ini mengingat bahwa asuransi sebagai konsep atau sebagai lembaga institusi tidaklah bisa melepaskan diri dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma atau aturan dasar hidup yang merupakan payung untuk menaungi seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk didalamnya praktik berasuransi.¹¹

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas yang mengatur praktik tentang asuransi, oleh karenanya perlu diadakan penggalan hukum oleh ulama' (Ijtihad) agar sistem asuransi tersebut tidak melanggar norma agama mengingat tujuan asuransi adalah memberikan kemudahan serta kemaslahatan ummat. Salah satu upaya untuk mewujudkan adalah dengan menciptakan produk asuransi yang

¹⁰Nejatullah Sidiqqi, *Asuransi dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 2004), h. 12.

¹¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi dalam Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: GIP, 2004), h. 30.

dijalankan dengan prinsip Islam.¹² Dengan demikian, dalam hal ini praktik asuransi dalam Islam masih menjadi perbincangan hingga perdebatan oleh para ulama fiqh kontemporer.

Sebagai bagian dari masalah fikih kontemporer, produk hukum tentang asuransi syariah memungkinkan untuk dikaji secara ijtihad. Di kalangan ulama kontemporer, di antaranya ada ulama yang bisa menerima praktik asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses islamisasi. Praktik yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi, seperti praktik riba (bunga), maysir, dan gharar. Penerimaan praktik asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi *ijma'* (keepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masa'il di NU, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹³ Alasan kebanyakan tidak diperbolehkannya melakukan praktik asuransi yakni mengenai ketidakjelasan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang yang melakukan praktik asuransi tersebut.

Untuk itulah dari uraian permasalahan tersebut maka peneliti akan melihat dan menelaah secara mendalam tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap asuransi serta menelaah dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tertanggung pada asuransi dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam dalam pembahasan ini adalah sebuah tatanan norma yang mempunyai muatan nilai historis dan realistik positif dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk

¹²Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 15.

¹³Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 20.

menyusun penelitian ini dalam skripsi yang berjudul “*Kedudukan Asuransi (Telaah atas Hukum Islam)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Kedudukan asuransi dalam telaah berdasarkan hukum islam?”.

Dari rumusan masalah pokok ini kemudian terbagi menjadi sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum asuransi dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi dalam perspektif hukum Islam?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan pengertian judul untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dari pembaca untuk memahami beberapa istilah pokok atau kalimat dalam penelitian ini. Berikut peneliti akan melampirkan pengertian dari judul yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Asuransi merupakan suatu persetujuan, dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi.¹⁴ Selain itu, asuransi ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih di mana pihak

¹⁴Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2014), h. 40.

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.¹⁵

2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Disamping itu, dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.¹⁶ Oleh karena itu, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang tingkah laku umat manusia.¹⁷

Adapun definisi operasinoal yang dimaksud adalah bagaimana kedudukan asuransi dalam telaah hukum Islam secara komprehensif, bahwa syari'ah Islam itu sendiri merangkum seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Kemudian bagaimana hukum Islam melihat seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dalam praktik asuransi serta bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015), h. 235.

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Ed.II (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42.

¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam dalam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

D. Kajian Pustaka

Dalam permasalahan yang peneliti kaji didalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran terkait tentang pembahasan judul skripsi ini yakni tentang bagaimana hukum islam menelaah secara mendalam tentang kedudukan asuransi, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul tersebut guna menilai apakah penelitian ini layak untuk diteliti atau tidak layak. Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan ini, terutama yang berkaitan langsung dengan asuransi dalam hukum islam. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hasan Ali, dalam bukunya *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: dalam suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Prakti*, menyatakan bahwa sebagai fenomena kontemporer, kajian tentang asuransi dalam perpektif Islam semakin intensif dilakukan. Terlebih setelah institusi keuangan berbasis syariah semakin berkembang dan mulai memberikan warna dalam perekonomian, utamanya di Indonesia. Buku ini berbicara tentang asuransi syariah secara lengkap dalam berbagai aspek. Dengan memfokuskan pembahasannya pada konsep dasar hukum Islam dan hubungannya dengan realita kekinian, asuransi dalam perspektif ekonomi konvensional dan sejarah, konsep dan praktiknya, ;andasan, pendapat ulama, akad yang membentuk asuransi syariah, serta landasannya operasional, dan seperti apa produk asuransi syariah di Indonesia.
2. Urbanus Uma, dalam bukunya *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori, dan Praktik Asuransi Syariah di Indonesia*, mengungkapkan bahwa lembaga ekonomi syariah berkembang begitu cepat dan meyakinkan karena memasuki tahapan yang menyerukan pendekatan yang lebih kritis dan integrative

terhadap keseluruhan teori dan praktek baik pada lembaga ekonomi nonkeuangan syariah maupun perbankan syariah. Paling tidak lembaga ekonomi syariah akan mendorong usaha bersama dalam suatu pandangan sistem syariah yang menyeluruh dan menekan konsentrasi kekuatan ekonomi pada sekelompok orang yang terkadang tidak saling berhubungan bahkan saling menzalimi satu sama lain.¹⁸ Buku ini memfokuskan dalam meletakkan keseluruhan teori dan praktek lembaga keuangan dalam perpektif ekonomi syariah dimulai dari moral Islam yang mewajibkan individu untuk mengubah keseluruhan pandangan tentang kehidupan dan motivasinya agar bergerak secara tepat dan benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan Islam (ketauhidan), termasuk dalam hal praktik asuransi yang secara tegas dalam ideologi Islam menekankan persaudaraan manusia yaitu semua individu sosial adalah sama dan menghauskan ketidakadilan sosioekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata.

3. Desmadi Saharuddin, dalam bukunya *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Eksistensinya tidak semata sebagai suatu bentuk dari industri bisnis semata, tetapi juga merupakan salah satu instrument finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi nasabahnya. Misi kesejahteraan dan ketentraman ini merupakan tujuan dari janji berasuransi. Misi ini akan menjadi absurd manakala hak nasabah atas indemnity menjadi tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan. Janji indemnitas atau pembayaran ganti rugi setimpal terhadap nasabah yang mendapatkan risiko merupakan bagian dari

¹⁸Urbanus Uma, *Asuransi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori, dan Praktek Asuransi di Syariah di Indonesia*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 2.

janji-janji surge dari perusahaan asuransi.¹⁹ Buku ini menyajikan dan mengulas perihal sistem asuransi syariah serta berdasarkan kaidah dan teori ekonomi islam serta perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan praktik asuransi dalam hal pembayaran ganti rugi pada asuransi tersebut dalam pandangan hukum islam, pembayaran ganti rugi dalam pandangan hukum asuransi dan fiqh muamalah.

4. Maya Kurniasari dalam Skripsinya “*Analisis Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah*” dimana dalam penelitiannya memfokuskan pada analisis tentang perbedaan asuransi konvensional dan syariah secara teoritis dan praktik. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pertama, masalah akad. Dalam operasional asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (tabaduli) atau tolong-menolong (takaful). Dalam asumsi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/ ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi biasa akad yang melandasi adalah jual beli (aqd tabaduli). Oleh karena itu syarat-syarat dalam akad jual beli harus terpenuhi dan tidak boleh dilanggar ketentuan syariahnya. Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, terdapatnya harga, dan barang yang diperjualbelikan. Pada asuransi biasa, penjual, pembeli, barang atau yang akan diperoleh ada, yang dipersoalkan adalah berapa besar premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah SWT yang tahu tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak

¹⁹Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Asuransi pada Asuransi Syariah* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 13.

jelas tergantung usia kita, dan hanya Allah swt. yang tahu kapan kita meninggal. Dengan demikian akadnya jual beli maka dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar), yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk non saving). Kedua, ada gharar (ketidakjelasan). Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan ma'qud 'alayh (sesuatu yang diakadkan), yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah swt. yang tahu kapan kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadilah gharar. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum. Takaful mengganti akad tadi dengan niat tabarru (aqd takafuli), yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta takaful apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah swt. mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah.²⁰

5. Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, dalam bukunya *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa sebagai sistem kehidupan, fiqh Islam telah mencakup seluruh isi kehidupan individu dan masyarakat secara umum, baik urusan perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik atau ketatanegaraan dan urusan lainnya seperti hukum dan keadilan. Singkatnya, fiqh muamalat dimaknai sebagai suatu

²⁰Maya Kurniasari, "Analisis Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah", *Skripsi* (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Cirebon Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 59-60.

pengetahuan tentang kegiatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari berdasarkan syariat Islam. Kegiatan transaksi muamalat atau perekonomian harus didasarkan pada hukum syariat Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara terperinci dan akurat. Hal ini dikarenakan setiap orang tidak terlepas dari urusan pengelolaan dan penggunaan harta benda kekayaan dalam kehidupan sehari-hari seperti pertukaran barang, uang, dan jasa. Dalam literatur ini sangat erat kaitannya dengan penelitian dalam skripsi ini yakni, pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam praktik asuransi harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam ekonomi Islam.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan seksama dalam memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala atau kejadian dengan jalan menganalisisnya.²¹

Metodologi penelitian adalah Cara ilmiah (Rasional, Empiris, dan Sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian, Penelitian tersebut dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.²² Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu

²¹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: t.p, 2004), h.1-2.

²²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 5.

cara untuk memahami objek atau gejala yang dapat ditelaah atau dianalisis berdasarkan permasalahan – permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek kajian dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang memerlukan olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan (Neong Muhajir 1996:196). Metode penelitian pustaka adalah penelitian yang menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²³

Metode dalam penelitian ini dengan mengumpulkan atau merujuk beberapa sumber dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan (literatur) untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi peneliti seperti Al-Quran ,Al-Hadis , Kitab Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, skripsi, jurnal atau artikel dan data-data lain yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas sebagai tujuan meletakkan dasar teoritis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini. Dimana dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hukum Islam menelaah terkait dengan kedudukan asuransi dalam perkembangan perekonomian manusia saat ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam

²³M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

menyusun penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, pendekatan teologi *normatif* (*Syar'i*) yaitu pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep. Adapun hal itu merujuk dengan Al-Quran dan Hadis yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun Pendekatan Histori yaitu pendekatan yang berdasarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang sesuai dengan fakta yang disimpulkan berdasarkan data-data yang kuat (*shahih*).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti juga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dekskriptif analisis dan analisis data sebagai berikut:

a. Dekskriptif Analisis

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah dengan cara melihat, meneliti, dan menggambarkan suatu masalah melalui sampel atau data yang ada bersesuaian dengan norma-norma yang berlaku dalam praktik asuransi dalam Islam.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpulkan, maka akan dilakukan analisis data, yaitu memaparkan dan menganalisa data-data yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Kesimpulan jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung sesuai dengan data yang diperoleh. Dalam hal ini data-data mengenai pro kontra kebolehan dalam melakukan praktik asuransi dalam kehidupan berekonomi Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi informasi dalam hal mengenai data, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴

Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber data diantaranya:

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh peneliti dari data-data yang orisinil (buku harian, laporan, ataupun catatan khusus).²⁵
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada (buku, jurnal, maupun laporan penelitianterdahulu). Bahan sekunder, selain dari pada Alquran dan hadist peneliti juga menjadikan buku-buku yang membahas masalah asuransi dalam pandangan hukum Islam sebagai rujukan dan juga bahan-bahan kepustakaan lain yang membahas terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang umum digunakan dalam penelitian pustaka atau dengan kata lain peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan dari tangan orisinil (data dari tangan pertama dilapangan). Data sekunder yang paling utama adalah buku teks.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, diadakan sebuah penelitian terhadap sumber data dalam rangka pengumpulan data-data yang ada terkait dengan bagaimana hukum islam menelaah terhadap kedudukan asuransi saat ini. Adapun sumber data yang dimaksud adalah “*Library Research*”, yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan literatur yang terkait dan relevan dengan masalah pokok dan sub-sub masalah dari penelitian yang kemudian dimuat kedalam beberapa metode yakni:

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

²⁵M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. XII; Jakarta: Sinar grafika, 2016), h. 54.

- a. Metode kutipan langsung yaitu berupa kutipan kalimat dari sumber data tanpa adanya pengurangan ataupun tambahan sedikitpun kalimat.
- b. Kutipan tidak langsung ialah kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat peneliti sendiri, namun substansinya tidak berubah, hal ini memang yang diharapkan.²⁷ Metode kutipan tidak langsung ialah berupa kutipan yang dimana kalimat dari sumber data yang dikumpulkan telah ditambah ataupun dikurang dengan menggunakan kalimat peneliti sendiri tanpa mengurasi substansi dari kutipan yang diambil.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah suatu proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari hasil bacaan, catatan khusus data orisinil, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat ditelaah dengan mudah, dan hasilnya dapat menjadi bahan informasi untuk orang lain. Peneliti melakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi, yaitu suatu pengelompokan atau mencocokkan sumber data yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap bagaimana hukum seseorang melakukan praktik asuransi dalam kehidupan serta bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap para pengguna jasa asuransi.
- b. Reduksi, adanya pemilihan data yang sesuai dan relevan dengan substansi yang ingin dibahas dalam penyusunan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

²⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 188-189.

- c. Editing data adalah proses dimana peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik dan dapat diolah dengan baik.²⁸

Analisis data yaitu suatu analisis yang berdasarkan pada data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan yang didapatkan dari beberapa literature bacaan mengenai pandangan beberapa ulama tentang praktik asuransi dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum asuransi dalam perspektif hukum Islam yang dalam dewasa ini masih menjadi pro-kontra dikalangan para ulama.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengetahuan hukum khususnya kajian tentang telaah dalam hukum Islam kaitannya dengan kedudukan asuransi. Kemudian diharapkan hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana hukum islam memandang perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi.

- b. Kegunaan praktis

²⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 330.

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pembaca atau yang membutuhkan literatur-literatur terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi penulis, akademisi dan masyarakat yang berkompeten atau memiliki minat yang sama dengan hal ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asuransi ialah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:²

1. Memberikan Penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 96.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Ayat (1).

kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³

Sedang dalam pandangan Abbas Salim, Asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (at-ta'min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁵

Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi, memberikan definisi asuransi dalam berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika.⁶ Lebih lanjut Darmawi menyatakan bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.

Islam memandang pertanggungans sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar tolong menolong dan rasa kemanusiaan. Sedangkan dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1987), h. 1.

⁴Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1.

⁵Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 138.

⁶Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 2.

keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum sendiri, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggunggunaan risiko antara tertanggung dan penanggung.

Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, dimana pihak tertanggung harus memberi premi asuransi kepada pihak penanggung atau memberikan suatu pembayaran untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan yang di derita oleh pihak tertanggung karena suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

Berdasarkan uraian definisi tersebut, maka dapat di uraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggunggunaan yakni sebagai berikut:⁷

a. Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang di asuransikan.

b. Status Pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (Persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang di asuransikan.

c. Objek Asuransi

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 8-9.

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin di capai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut di buat dalam bentuk tertulis berupa akta yang di sebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang di pakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, Jika tidak terjadi *evenemen*, premi yang sudah di bayar oleh pihak tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Ada berbagai macam asuransi di antaranya asuransi kerugian dan jiwa. Asuransi kerugian berhubungan langsung dengan risiko-risiko selain terkait dengan jiwa seseorang seperti kebakaran, dan kecelakaan. Konkretnya pertanggungungan dalam asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Adapun asuransi jiwa ialah asuransi yang dimana dipertanggungungkan didalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan sebagai akibat dari hilangnya jiwa atau karena lanjut usia.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungungan merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga.⁹

Berdasarkan rumusan diatas, salah satu unsur terpenting dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan atau usaha yang dimiliki seseorang. Maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian, yakni sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penanggung dan tertanggung
- 2) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- 3) Benda asuransi dan kepentingan tertentu

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015), h. 236.

⁹Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 246.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 9-10.

- 4) Tujuan yang ingin dicapai
- 5) Risiko dan premi
- 6) *Evenemen* dan anti kerugian
- 7) Syarat-syarat yang berlaku
- 8) Bentuk akta polis asuransi

B. Tujuan Asuransi

Setiap orang yang memiliki suatu benda atau usaha tentu akan menghadapi suatu risiko terhadap kerusakan, kehilangan, atau kerugian dan atau sebab lainnya dari benda tersebut. Disebabkan oleh kebakaran misalnya maka benda seseorang akan hancur, karena pencurian maka benda seseorang akan hilang dan ia akan mengalami kehilangan barang, atau karena angin topan, seseorang akan mengalami kerugian dari hasil panennya. Untuk itu jika hal tersebut dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah risiko kerugian atau kerusakan seseorang dapat diperingan atau dikurangi, dan bahkan ditanggung oleh orang lain yakni dengan cara melakukan perjanjian dalam bentuk asuransi.¹¹

Dengan demikian, dari uraian tersebut maka tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko karena peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Kemudian dari tujuan asuransi secara umum tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan asuransi dibagi menjadi dua yakni:

- a. Tujuan secara ekonomi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

¹¹Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 7-8.

- b. Sedangkan tujuan secara hukum adalah untuk memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain, maksudnya adalah memindahkan suatu risiko pihak tertanggung kepada pihak penanggung.

Adapun tujuan asuransi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan jaminan perlindungan atas risiko-risiko kerugian yang dialami oleh satu pihak.
- b. Sebagai pemerataan biaya, yaitu satu pihak membayar sejumlah iuran atau premi kepada pihak penanggung dan tidak perlu lagi mengganti kerugian atau kerusakan secara pribadi dengan jumlah yang tidak pasti.
- c. Meningkatkan efisiensi, dalam hal ini pihak tertanggung tidak perlu secara khusus melakukan pengawasan atau pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu dan biaya.
- d. Untuk mengalihkan risiko kepada pihak tertanggung, yang semula ada pada pihak tertanggung untuk memberikan ganti kerugian.
- e. Tertanggung mengadakan asuransi untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

C. Prinsip Dasar Asuransi

Dalam industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan perasuransian.

1. Keseimbangan

Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung dan tidak lebih besar daripada kerugian tersebut. Batas tertinggi

kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.¹² Keseimbangan yang dimaksud adalah seimbangnya antara risiko yang dialihkan oleh tertanggung kepada penanggung karena kerugian yang diderita akibat suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

2. Kepentingan yang dapat Diasuransikan

Setiap kepentingan dapat diasuransikan, selama kepentingan itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.

3. Itikad Baik

Prinsip ini dapat diartikan bahwa setiap pihak yang ada dalam perjanjian asuransi berkewajiban untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang akan diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.¹³ Kontrak asuransi sudah seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik, karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian fakta pokok risiko yang diketahuinya.

4. Subrogasi

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi: “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan

¹²Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, h.67.

¹³Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 78-79.

kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.¹⁴

Pada Umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.¹⁵ Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

D. Syarat-syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) berlaku juga bagi perjanjian asuransi.¹⁶

1. Kesepakatan

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi

¹⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 284.

¹⁵Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, h.69.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.49.

melalui jasa perantara. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

2. Kewenangan

Kedua pihak tertanggung dan penanggung melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.¹⁸ Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam rangka mengadakan hubungan internal dilingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi pihak tertanggung.

3. Objek Tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 50.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 50-51.

4. Kausa yang Halal

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransiyang diimbangi dengan pembayaran premi.



BAB III

ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM

A. Prinsip Umum Muamalah

Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan hidup didunia dan akhirat), perilaku manusia dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia, kedua hal tersebut berinteraksi dengan kedudukannya masing-masing, sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang sesuai dengan dasa-dasar nilai ilahiyah.

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah bersifat adabiyah ialah ijab dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut:¹

1. Harta, Hak milik, Fungsi uang, dan '*Uqud* (akad-akad),
2. *Buyu'* (tentang jual beli),
3. *Ar-Rahn* (tentang pegadaian),
4. *Hiwalah* (Pengalihan hutang),
5. *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis),
6. *Adh-Dhaman* (jaminan, asuransi),

¹Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 5.

7. *Syirkah* (tentang perkongsian),
8. *Wakalah* (tentang perwakilan),
9. *Wadi'ah* (tentang penitipan),
10. *'Ariyah* (tentang peminjaman),
11. *Ghasab* (rampasan harta orang lain dengan tidak sah),
12. *Syuf'ah* (hak diutamakan dalam *syirkah* atau sepadan tanah),
13. *Mudarabah* (*Syirkah* modal dan tenaga),
14. *Musaqat* (*syirkah* dalam pengairan kebun),
15. *Muzaraah* (kerja sama pertanian),
16. Riba, konsep uang dan kebijakan moneter,
17. *Qaradh* (pinjaman),
18. Prinsip dan perilaku konsumen,
19. Prinsip dan perilaku produsen,
20. Keadilan distribusi,
21. Pasar modal islami dan redaksana,
22. Asuransi islam, bank islam, pegadaian dan MLM,
23. Barang tambang, dan lain-lain.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Bidang-bidang inilah yang menurut para

ahli *ushul fiqh* disebut persoalan-persoalan *ta'aquliyyat* (yang bisa dinalar).² Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang terpenting adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.

Namun dalam kaitannya dengan perkembangan perilaku manusia dan dalam perubahan sosial tersebut seringkali pengkajian dalam bidang ekonomi syariah terlupakan, akibatnya banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, haram dan batil. Hal ini sejalan dengan banyaknya kehadiran lembaga ekonomi syariah yang dalam dewasa ini sering tidak dipahami sekedar sebagai lembaga alternatif dari praktek lembaga ekonomi konvensional yang ada, melainkan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat muslim untuk bermitra dengan lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya asuransi.³ Maka dalam hal ini, prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat *major*.⁴ Berdasarkan rumusan tersebut, maka prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 18.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 6.

⁴Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 125.

1. Prinsip Tauhid (Unity)

Prinsip Tauhid (Unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.⁵

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (Sang Khalik). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah swt⁶. Hal ini sesuai dalam Firman Allah QS. al-Hadiid/57:4 sebagai berikut;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk kedalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kesana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷

Berdasarkan ayat diatas, maka sudah jelas bahwa dalam bermuamalah, begitu juga dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.7.

⁶Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 126.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h.785.

menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman semacam itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah.⁸

2. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi?, karena apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Karena memang dalam Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan perundang-undangan dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana berinteraksi agar tidak terjerumus kedalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan.⁹

Selain caranya yang harus halal, barang yang di jualbelikan pun harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung, dan lain-lain. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang tidak disembelih secara *syar'i*, maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan pembayaran yang haram.¹⁰

3. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang memeberikan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka

⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 126.

⁹A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 2.

¹⁰Abdullah, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan, 2008), h. 130.

mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.¹¹

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *maslahah* merupakan prinsip yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maslahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam dan harus ditinggalkan.¹² Dengan kata lain, syariat Islam sangat mendorong sektor yang nyata, untuk kemaslahatan umat.

4. Prinsip Ibadah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* yang dimaksud diantaranya:¹³

- a. Muamalah yang dilakukan seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt. dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 9.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.10.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.12.

- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengentengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram.¹⁴

6. Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (oersaudaraan dan saling membantu). Dalam hal ini, kerjasama dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi islam bersumber dari ajaran islam diantaranya dapat disebut *qirad*. *Qirad* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha.¹⁵

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. *Mudharabah* adakah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 11.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana atau premi kepada perusahaan asuransi untuk dikelola. Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.¹⁶

7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.¹⁷ Zakat mempunyai fungsi sebagai salah satu pendorong kehidupan perekonomian hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh agar orang-orang dapat menunaikan zakat dan tidak menampung hartanya dan sebagai salah satu jalan untuk melakukan tolong menolong terhadap orang yang lemah atau membutuhkan.¹⁸

8. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.¹⁹ Oleh karena itu, adil dengan makna sama dimaksudkan

¹⁶Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 129-130.

¹⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 5.

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.11.

memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak.²⁰

Prinsip keadilan juga dijadikan dasar dalam berasuransi. Pertama, nasabah harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban untuk membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.²¹

9. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggungjawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dan lain-lain.²² Hal ini berdasar pada Firman Allah swt. dalam QS. an-Nisaa'/4:58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²³

²⁰Urbanus Uma, *Asuramsi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori, dan Praktek Asuransi Syariah Di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 78.

²¹A. Khasmir, *Lembaga Keuangan Non Bank* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 5.

²²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 12.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 113.

Dalam hal ini, prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah tidak memberikan informasi yang benar dalam menyampaikan kerugiannya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi amanah dan dapat dituntut secara hukum.²⁴

10. Prinsip Tolong-menolong (Ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam bermuamalah adalah tolong-menolong. Prinsip ini pula yang berlaku dalam asuransi, yakni dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.²⁵ Dalam konsep tolong-menolong sesungguhnya telah didalilkan dalam Alquran di antaranya dalam QS. al-Maidah/5:2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Terjemahnya:

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²⁶

²⁴Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 130.

²⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 127.

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 141.

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utama dan menyalahi prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri.²⁷

11. Terhindar dari Riba

Secara etimologi riba berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminology fiqh, riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.²⁸ Mengenai hal ini, Allah swt. berfirman dalam QS. an-Nisa'/4:29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak, jadi setiap modal dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah riba.³⁰

²⁷Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 128.

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 19-20.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 108.

³⁰Mardani, *Haramnya Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Majalah Ombudsman News, Vol. V, Mei 2009), h. 24.

12. Terhindar dari *Maisir*

Allah swt. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi), firman Allah dalam QS. al-Maidah/5:90 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”³¹

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat dari permainan tersebut. Hal ini tampak jelas bahwa unsur *maisir* artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.³²

13. Terhindar dari *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam.³³ Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.³⁴

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 163.

³²Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 134.

³³Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

³⁴Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 135.

B. Dasar Hukum Asuransi dalam Islam

Asuransi syariah yang belakangan ini berkembang sebagai industri bisnis dibidang jasa, secara hukum tidak ditemukan dalilnya yang jelas didalam Alquran dan Alhadis, namun isyarat dalil yang menunjuk tentang interaksi ekonomi dan sosial dipahami bahwa terdapat banyak diantara ayat Alquran maupun hadist yang menganjurkan bahkan menyerukan setiap manusia untuk membangun hubungan sosial ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.³⁵ Landasan asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Alquran dan sunnah Rasul.³⁶

1. Al-Qur'an

Apabila dilihat secara keseluruhan dalam Alquran, maka tidak terdapat secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* dalam Alquran. Walaupun demikian, Alquran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.³⁷

Diantara ayat-ayat Alquran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah sebagai berikut:

³⁵Urbanus Uma, *Asuramsi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori, dan Praktek Asuransi Syariah Di Indonesia*, h. 29.

³⁶Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 104.

³⁷Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 105.

- a. Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama dalam QS. al-Maidah/5:2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³⁸

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Isyarat dalam Alquran lebih banyak menekankan kewajiban sosial bagi setiap individu untuk berbuat baik kepada sesama bahkan kualitas dari kebaikan adalah membantu atau menolong sesama, mengurangi bahkan membebaskan sesama dari derita kehidupan. Bekerja sama dalam melakukan kebaikan tidak sekedar saling menolong, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan bagi manusia.³⁹ Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial.

- b. Perintah untuk Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha dalam QS. al-Taghaabun/64:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁰

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 141.

³⁹Urbanus Uma, *Asuramsi Syariah Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Teori, dan Praktek Asuransi Syariah Di Indonesia*, h.31.

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 814.

Allah swt. telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi dimasa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah swt. yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Nilai yang kemudian dapat ditarik dari ayat tersebut adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya sedikit mungkin. Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

c. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan dalam QS. Yusuf/12:46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرٍ يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ
مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا خُصُّونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. "Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian

setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”⁴¹

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa dimasa mendatang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, tertanggungnya kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada peristiwa diatas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan penabungan selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas untuk dapat dipraktikan dalam asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta dalam mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena dalam hal ini prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah perlindungan terhadap kejadian yang akan membawa kerugian ekonomi.

2. Hadist tentang anjuran untuk menghilangkan kesulitan seseorang

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad saw. bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya didunia dan diakhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 324.

sesama muslim.” (Muttafaun ‘alaihi, HR. Al-Bukhari: 6 dan Muslim: 2308).⁴²

Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah swt. akan memudahkan segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadist ini terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal memang mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana.

3. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik (pembagian wilayah administrasi). Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertamakali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁴³

⁴²Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*; Penerjemah: Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2011), h. 555.

⁴³Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern dalam mengajukan suatu alternatif baru dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2000), h. 31.

4. Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam *aqilah* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma'* dikalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.⁴⁴ Peananggungan bersama dalam *aqilah* tersebut merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.⁴⁵

5. Istihsan

Istihsan dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang sesuatu itu baik. Istihsan adalah cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.⁴⁶ Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dikalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah.⁴⁷

⁴⁴Wirdyaningsih, Karnaen, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 195.

⁴⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 115.

⁴⁶Daud Ali Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 122.

⁴⁷Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 196.

C. Hukum Asuransi dalam Islam

Asuransi adalah sesuatu yang baru dalam literature fiqh islam dan termasuk dalam kategori masalah kontemporer yang baru terangkat kepermukaan pada akhir abad 18, yaitu tepatnya setelah Ibnu Abdin (1784-1836 M), seorang ahli hukum islam yang menganut mazhab Hanafi mengomentari praktik asuransi dalam sebuah kitabnya *Rad Al-Mukhtar*.⁴⁸

Dalam menyikapi persoalan ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum terhadap praktik asuransi. Secara garis besar masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok yakni ulama yang mengharamkan asuransi dan ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini masing-masing memiliki dasar hukum sebagai penguat terhadap pendapat mereka. Disamping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, serta ada pula yang meragukannya.⁴⁹

Pertama-tama peneliti akan menguraikan terkait dengan pendapat ulama-ulama yang membolehkan dilakukannya asuransi. Argumentasi yang dipergunakan para ulama dalam memperbolehkan asuransi menurut Fathurrahman Jamil adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Tidak terdapat Nash Alquran atau Hadist yang melarang asuransi.
2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
3. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.

⁴⁸Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern dalam mengajukan suatu alternatif baru dalam Hukum Islam*, h. 3.

⁴⁹Nandi Rahman, *Asuransi Takaful Keluarga menurut ekonomi Islam* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), h. 4.

⁵⁰Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarji Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h. 137.

4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan dalam kegiatan pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad mudharabah antar pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
6. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awwujia*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Selain alasan-alasan yang disebutkan oleh Fathurrahman Jamil diatas, alasan-alasan yang juga dipergunakan dalam mempertahankan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Asuransi bukan merupakan perjudian dan juga bukan taruhan, karena berdasarkan konsep kepentingan bersama. Sedangkan perjudian adalah permainan yang bergantung pada nasib, letak perbedaannya adalah perjudian merusak masyarakat sedangkan asuransi merupakan suatu kemudahan untuk seseorang sebagai persiapan dalam menghadapi bahaya yang mengancam hidup dan hartanya.
2. Asuransi jiwa bukanlah suatu rancangan untuk mengatasi kekuasaan Tuhan, karena pihak asuransi tidak menentukan ataupun memastikan bahwa suatu perkara yang belum terjadi itu pasti akan terjadi, namun ia akan membayar ganti rugi kepada tertanggung yang menghadapi kemalangan tertentu, ini merupakan bentuk kerjasama agar meringankan beban kerugian akibat suatu kemalangan dan kenyataan ini didukung oleh ayat Alquran dalam QS. al-Maidaah/5:2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵¹

3. Penentangan terhadap riba dalam asuransi jiwa dianggap kecil karena pihak tertanggung dapat memilih pembayaran ganti rugi yang lebih dari pembayaran anggurannya. Dan juga tidak seharusnya ada penentangan terhadap mereka yang mengikat perjanjian dengan perusahaan asuransi karena orang yang mengambil asuransi itu haruslah mematuhi undang-undangnya.⁵²

Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat Muhammad Yusuf Musa, bahwa asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerja sama dan berguna bagi masyarakat, karena jika kita memperhatikan dengan seksama kedua belah pihak dalam hal ini peserta asuransi dan perusahaan asuransi sama-sama mendapatkan manfaat. Karena dalam hal ini tidak ada ruginya dalam hukum islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi hanya mengambil yang telah dibayarkannya tanpa tambahan apapun jika ia hidup lebih lama dari masa asuransi dan jika ia mati, maka ahli warisnyalah yang mendapat kompensasi, dan ini sah menurut hukum Islam.⁵³

Adapun para ulama yang tidak membolehkan praktik asuransi ini diwakili oleh beberapa ulama diantaranya Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khalaf (Pengarang Ilmu Ushul Fiqh), Mustafa Ahmad Zarqah (Guru Besar Hukum Islam Universitas Siria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo Mesir), Syekh Ahmad Asy-syarbahi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim). Sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa tidak hanya ada ulama yang membenarkan asuransi, namun ada

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.141.

⁵²Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 126.

⁵³Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, h. 152.

juga ulama yang melarang praktik asuransi. Ulama yang membenarkan asuransi bersikap keras dan tegas menyatakan perang terhadap asuransi, bahkan berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diamteris bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan dalam hukum Islam. Asuransi dianggap berbahaya, tidak adil dan tidak pasti. Pada umumnya, alasan-alasan penentangan para ulama itu adalah:

1. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan.
2. Asuransi merupakan perjudian semata-mata.
3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti.
4. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan iradat Allah.
5. Dalam asuransi jiwa jumlah premi tidak tetap karena peserta asuransi tidak tahu berapakah cicilan yang akan diabayarnya sampai ia meninggal.
6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga berbunga.
7. Seluruh bisnis asuransi adalah riba.

Adapun Warkum Sumitro, memberikan pendapatnya tentang pengharaman asuransi setidaknya dengan enam alasan sebagai berikut:⁵⁴

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam islam.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
4. Asuransi merupakan jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
5. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang yang berarti mendahului takdir Allah.
6. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

⁵⁴Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 166

Mahdi Hasan melarang praktek asuransi dikarenakan:⁵⁵

1. Asuransi tak lain adalah riba, berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat padahal kesetaraan wajib adanya.
2. Asuransi juga adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko.
3. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi meskipun milik negara merupakan, institusi yang mengadakan transaksi dengan riba.
4. Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan, karena kompensasi didalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Adapun ulama yang mengharamkan asuransi diantaranya adalah Sayyid Sabit (Pengarang Fiqh Al-Sunnah), Abdullah Al-Kolquili (Mufti Yurdan), Muhammad Yusuf Al-Qhardawi, Mahdi Hasan, dan Mahmud Ali.⁵⁶ Secara garis besar alasan utama pengharaman asuransi menurut ulama diatas yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.

Dari kontroversi pendapat ulama diatas, antara yang menghalalkan dan mengharamkan sebagai alternatif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, peneliti akan menguraikan solusi yang mengacu pada hujjah pemikiran dari kedua belah pihak yang peneliti kutip dalam sebuah buku Hasan Ali yakni:⁵⁷

1. Asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan jika terlepas dari unsur riba, gharar, dan maisir yang menjadi dasar pemikiran para ulama yang mengharamkan asuransi.

⁵⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: suatu tjuauan analisis historis, teoretis dan praktis*, h.143.

⁵⁶Nazifuq Zuhdi, *Masa'il Fiqhiah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h.162.

⁵⁷Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tjuauan Analisis Historis, Teoretis Dan Praktis*, h. 149.

2. Jumlah yang dibayarkan untuk polis asuransi diinvestasikan berdasarkan prinsip mudharabah yang mana pemberi pinjaman ikut menanggung keuntungan maupun kerugian, untuk usaha-usaha komersil. Sebagai pengganti bunga yang ditentukan sebelumnya, keuntungan dibagi sebagaimana umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersil.
3. Untuk menjalankan bisnis asuransi dalam bentuk koperasi para pemegang polis harus setuju untuk menyumbangkan sebagian keuntungan mereka sepertiga atau seperempat untuk dana cadangan dalam bentuk wakaf dibawah peraturan-peraturan khusus untuk membantu orang-orang yang menjadi korban kecelakaan.
4. Jika terjadi kecelakaan, bantuan hanya diberikan kepada yang terikat kontrak ini dan para pemegang saham perusahaan.
5. Jumlah asli ditambah dengan keuntungan, diberikan kepada setiap pemegang saham yang akan dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadangan akan tetap sebagai wakaf.
6. Perlu adanya dewan pengawas syariah independen yang dapat betul-betul mengontrol operasional perusahaan asuransi, apakah akad dan produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ASURANSI

A. Asas Hukum Perlindungan Asuransi

Sebelum kita menelaah jauh tentang asas hukum terhadap perlindungan asuransi, maka terlebih dahulu yang perlu kita pahami yakni makna dan pengertian secara umum mengenai perlindungan hukum itu sendiri. Pengertian dari perlindungan hukum secara menyeluruh dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang mempunyai kekuatan hukum di dalamnya dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan haknya yang sudah sepatutnya untuk dilaksanakan.

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum juga dijabarkan oleh Soetjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Perlindungan hukum terbagi atas dua hal dan memiliki keterkaitan antara rakyat dengan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan. Demikian pula menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebuah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarah pada tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan

¹Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), h. 121.

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.²

Pada prinsipnya, perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yakni, sebagai berikut:³

1. Sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturankhusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2-3.

³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, h. 3-7

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Dari pengertian inilah dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian perlindungan hukum dalam kaitannya perlindungan terhadap pengguna asuransi yakni:⁴

1. Suatu jaminan yang di berikan oleh negara. Jaminan perlindungan adalah jaminan yang diberikan oleh negara (dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia) dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan kepada semua pihak. Yang dimaksud dengan semua pihak disini adalah nasabah sebagai pihak tertanggung asuransi dan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang berkepentingan dalam hal perjanjian asuransi.
3. Untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain. Pengertian kekuasaan disini diartikan sebagai kewenangan (*bevoeged*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum (misalnya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi). Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah keperluan atau kepentingan dari subjek hukum (pemegang atau pengemban hak dan kewajiban) yang diatur oleh hukum (dalam hal ini adalah Undang-Undang).

⁴Eko Setiawati Junita, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 11-12.

4. Kepastiannya sebagai subjek hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Artinya adalah dalam kapasitasnya sebagai manusia dan badan hukum dalam mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan.⁵

Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan dana asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.⁶ Dengan demikian, masyarakat pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan

⁵Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian* (Cet. V; Bandung: Alumni, 2013), h. 1.

⁶Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, h. 1-2.

perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan diri konsumen harus mendapatkan perlindungan yang berdasarkan asas seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:⁷ “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁸

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk membrikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25-26.

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas hukum perlindungan konsumen tersebut, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa bidang hukum ini berada dalam kajian bidang hukum ekonomi, mengingat bahwa lembaga asuransi merupakan produk lembaga ekonomi yang sedang berkembang pesat dalam era dewasa ini.

Hukum ekonomi yang dimaksud, mengakomodasi dua aspek hukum sekaligus yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat (perdata), dalam hubungan ini, maka hukum ekonomi mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum yang dimaksud. Didalamnya mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan di dalam kegiatan ekonomi. Asas-asas utama dari hukum ekonomi yang bersumber dari asas-asas hukum publik antara lain asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. Sedangkan asas-asas hukum yang bersumber dari hukum perdata dan/atau hukum dagang yaitu khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu kegiatan atau perjanjian tertentu atau perbuatan hukum tertentu dimana harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain.⁹

Oleh karena hukum ekonomi mempersoalkan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi, maka asas lain yang berlaku dan patut dijadikan dasar dalam rangka perlindungan terhadap nasabah asuransi dan pelaku usaha adalah asas-asas yang berlaku dalam aspek kegiatan ekonomi tersebut. Berangkat dari hal ini, maka dalam hukum ekonomi juga berlaku asas maksimalisasi dan asas

⁹Sri Redjeki Hartono, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan*, dalam *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 71-72.

efisiensi. Melalui asas ini suatu aturan yang hendak diambil atau diterapkan harus mempertimbangkan sesuatu yang lebih menguntungkan secara maksimal bagi semua pihak, demikian pula harus menghindari suatu prosedur yang panjang dalam rangka efisiensi waktu, biaya dan tenaga.¹⁰

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai asas perlindungan terhadap pengguna asuransi tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan daripada perlindungan konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:¹¹

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

¹⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 31.

¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha.
7. produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya perlindungan terhadap nasabah asuransi yang berkedudukan sebagai konsumen (pemakai jasa) dan pelaku usaha asuransi sebagai produsen (pemilik jasa).

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menguraikan mengenai dua bentuk perlindungan hukum secara umum. Maka pada pembahasan selanjutnya sebelum peneliti menguraikan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang lebih khusus terhadap pengguna asuransi, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang klasifikasi hukum dan klasifikasi dari asuransi tersebut.

Menurut kenyataan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat bangsa Indonesia, hukum positif dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹²

1. Hukum perundang-undangan yang bersumber dari badan perundang-undangan yang secara resmi diberi bentuk tertulis dan diumumkan secara luas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.267-268.

2. Hukum adat dan kebiasaan yang bersumber dari masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sifatnya tidak tertulis, namun hidup dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat.
3. Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah swt. Melalui Rasulullah, dihimpun dan secara tertulis dalam kitab suci Alquran; yang bersumber dari ucapan dan perbuatan Rasulullah, dihimpun secara tertulis dalam buku hadis shahih; yang bersumber dari lembaga-lembaga Islam atau para alim ulama Islam, dihimpun secara tertulis dalam buku fiqh Islam atau fatwa alim ulama.
4. Hukum yurisprudensi yang bersumber dari putusan hakim, dihimpun secara tertulis dalam buku yurisprudensi Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan klasifikasi hukum positif diatas, dapat dipahami posisi dan status hukum asuransi syari'ah dalam sistem hukum Indonesia. Asuransi syari'ah secara substansial bersumber dari hukum Islam, terutama yang mengatur tentang akad sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak. Akan tetapi, secara formal dari segi bentuk hukum usaha (badan usaha) bersumber dari hukum perundang-undangan karena asuransi syari'ah adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu, kedudukan asuransi syari'ah dari segi hukum adalah kuat dan legal dalam sistem hukum Indonesia, dan secara bisnis operasional memperoleh dukungan kuat dari masyarakat karena didasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, transparan, dan bebas dari kezaliman.

Kemudian menurut kenyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini, bisnis asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹³

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.268-269.

1. Asuransi kerugian, yaitu bisnis asuransi yang objek perlindungannya adalah harta kekayaan milik seseorang yang diancam risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Termasuk asuransi kerugoian adalah asuransi kerugian konvensional, asuransi takaful umum (asuransi syari'ah).
2. Asuransi jiwa, yaitu bisnis asuransi yang objek perlindungannya adalah diri dan/atau nyawa seseorang yang diancam risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan cacat tubuh. Bahkan kematian akibat musibah atau kecelakaan.
3. Asuransi sosial, yaitu asuransi yang objek perlindungannya adalah anggota masyarakat pejalan kaki atau penumpang kendaraan umum yang diancam risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan cacat tubuh atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas melalui jalan raya, rel kereta api, perairan, atau udara. Termasuk asuransi sosial adalah asuransi sosial jasa raharja yang dikelola oleh negara melalui BUMN.
4. Asuransi kesehatan, yaitu asuransi yang objek perlindungannya adalah badan seseorang yang diancam risiko atau bahaya penyakit yang dapat menimbulkan kerugian berupa pengeluaran biaya pengobatan dan perawatan. Termasuk asuransi kesehatan adalah asuransi kesehatan diri (askes).
5. Asuransi tenaga kerja dan jaminan hari tua, yaitu asuransi yang objek perlindungannya adalah tenaga kerja dan hari tua yang diancam risiko atau bahaya yang menimbulkan kerugian berupa kehilangan nafkah akibat ketidakmampuan kerja dan ketiadaan nafkah di hari tua. Termasuk asuransi tenaga kerja adalah jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang dikelola oleh negara melalui BUMN.

Berdasarkan klasifikasi asuransi tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi syari'ah baru melakukan kegiatan operasionalnya dalam lingkup asuransi kerugian dan jiwa. Untuk masa mendatang sesuai dengan visi asuransi syari'ah dan tujuannya untuk kemaslahatan umum.

Di sadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat seperti:¹⁴

1. Membantu masyarakat dalam rangkamengatasi segala risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.
2. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirasakan pula diperlukan peningkatan dan memasyarakatkan usaha perasuransian menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khususnya berhubungan dengan dana yang mereka kumpulkan yang kadang-kadang berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu tidak hanya ditingkatkan pemasyarakatan asuransi, tetapi juga perlu diciptakan bisnis asuransi yang sehat, sehingga masyarakat konsumsi asuransi memperoleh perlindungan hukum, demikian juga pemerintah memperoleh manfaat dari usaha perasuransian tersebut.¹⁵

Undang-Undang Perasuransian baru, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dipandang sebagai sebuah produk hukum perasuransian yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat konsumen asuransi mencakup pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Dikatakan berpihak pada kepentingan atau hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, karena dalam UU Perasuransian baru, telah mengatur banyak pasal berkenaan dengan upaya untuk memperjuangkan kepentingan atau hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Roh akan kentalnya perjuangan pembuat undang-undang (*legal drafter*) pada kepentingan masyarakat konsumen asuransi sudah dirasakan dibagian konsideran (dasar

¹⁴Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, h. 116.

¹⁵Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, h. 116-117.

menimbang) dari UU Perasuransian baru, sekaligus sebagai tujuan dari undang-undang ini yang menegaskan bahwa kehadiran undang-undang baru di bidang perasuransian menjadi dasar bagi lahirnya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif sehingga akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dan sejalan dengan itu, akan berperan mendorong pembangunan nasional. Pada alinea terakhir penjelasan umum UU Perasuransian baru, sangat ditegaskan bahwa pengaturan dalam undang-undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian.¹⁶

1. Pasal-Pasal yang mengatur Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta Asuransi

UU Perasuransian baru, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah mengatur satu bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Bab khusus dimaksud adalah bab 11, terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 53 (program penjaminan polis) dan Pasal 54 (lembaga mediasi).

Bila membaca dan menelusuri pasal demi pasal dari UU Perasuransian baru, sebenarnya tidak hanya terbatas pada Pasal 53 dan Pasal 54, tetapi terdapat banyak ketentuan lain baik langsung maupun tidak langsung ditujukan atau berkenaan dengan perhatian dan dukungan besar pada upaya perlindungan hukum terhadap

¹⁶Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Cet. I; Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 153-154.

konsumen asuransi (pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi). Pasal-pasal yang dimaksud yakni:¹⁷

Pasal 15

Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.

Pasal 19 ayat (2)

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

Pasal 20

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21 ayat (1) dan (2)

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dan kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (2) Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.

Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5)

- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 24 ayat (1) dan (2)

- (1) Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri.

Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7)

- (2) Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (3) Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
- (4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

Pasal 29

- (1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.
- (2) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang reasuransi.
- (3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (5) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas

pembayaran klaim yang timbul dan kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pasal 30

- (1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Asuransi atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan pialang reasuransi dilarang menempatkan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah pada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Reasuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi bertanggung jawab atas tindakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikan rekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupan asuransi atau penutupan reasuransi.

Pasal 31

- (1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Pasal 35 ayat (4)

- (4) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 ayat (2)

- (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.

Pasal 48 ayat (1)

- (1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), tagihan yang timbul dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 49 ayat (2)

- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 52 ayat (1), (2), dan (4)

- (1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- (4) Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan

- Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- (2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.
 - (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak, apabila kreditur dalam keadaan tidak mampu membayar lunas utang-utangnya. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor, bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada kreditor. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.¹⁸

Mengenai perlindungan hukum kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan perasuransian, hukum positif Indonesia sudah memberikan jalan keluar dengan beberapa alternatif pilihan

¹⁸Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Kepailitan modern, Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000, h. 37.

yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan ketentuan Undang-Undang Perasuransian.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata)

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seorang pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dalam kasus kepailitan asuransi merupakan persoalan hak, tagihan atau piutang yang dilakukan dengan proses sita massal dengan menempatkan harta debitur dalam budel pailit. Sita massal melalui permohonan pernyataan pailit ini, hanya bisa dilakukan bila terbukti secara sederhana (sumir) melalui putusan Pengadilan Niaga, bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar, setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih.

Selain melalui sita massal, seperti disebutkan diatas, sebenarnya terdapat tata cara pembayaran utang-utang debitur melalui prosedur biasa (diluar kepailitan), yaitu melalui lembaga jaminan pembayaran utang secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Tata cara pembayaran utang secara umum ini bisa ditempuh kreditor bila kreditor sepakat tidak menempuh jalur atau prosedur kepailitan. Pasal ini menyatakan bahwa “Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akanada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan.”¹⁹

Dari ketentuan pasal diatas, pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan atas utang-utangnya kepada semua kreditor. Kekayaan debitor, meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, demikian juga dengan benda-benda yang sudah ada saat perjanjian utang-piutang diadakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata ini, seluruh harta kekayaan debitor tanpa

¹⁹Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, h. 162.

terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan atau tidak. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu diperjanjikan sebelumnya.²⁰

b. Undang-Undang Kepailitan

Walaupun dalam Pasal 2 butir (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyinggung masalah kepailitan perusahaan asuransi, tetapi dalam pasal-pasal berikutnya tidak ditemukan satupun pasal yang menyinggung mengenai perihal kedudukan pemegang polis. Bila ditelaah satu persatu, pasal-pasal dari UU Kepailitan memang lebih banyak berbicara mengenai kepentingan para kreditor. Dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan asuransi, maka salah satu kreditor adalah pemegang polis asuransi yang lebih dikenal dengan tertanggung.

Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah benar tertanggung dilindungi secara wajar oleh UU Kepailitan? Bagaimana posisinya dalam hal mendapatkan pengembalian piutang dari harta pailit perusahaan asuransi?

Bila UU Kepailitan ditelaah secara lebih dalam, kedudukan tertanggung sebagai kreditor bisa dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUK lama (UU No. 4 Tahun 1998).

Pasal 56 ayat (2)

Bila tagihannya merupakan hal yang dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 127, barulah tuntutan ini dapat dilaksanakan setelah terjadinya percocokan utang piutang, danuntutannya hanya merupakan sejumlah uang yang tagihannya memang dapat diakui keberadannya.²¹

²⁰Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 10.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Pasal 56 Ayat (2)

Mengenai kedudukan tertanggung sebagai kreditor, hal demikian masih dipertahankan di dalam UUK baru (UU No. 37 Tahun 2004), di mana hal itu diatur dalam pasal 55 ayat (2).

Pasal 55 ayat (2)

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.²²

Dengan demikian, menurut pasal 56 ayat (2) UU Kepailitan lama atau pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan baru, piutang para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya piutang para kreditor separatis atau yang diistimewakan. Melainkan piutang tersebut langsung dibayarkan setelah melalui proses pencocokan piutang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh hakim pengawas. Dengan kata lain, pembayaran piutang kepada para nasabah asuransi (tertanggung) baru dinyatakan setelah kurator menuntaskan proses pembayaran kepada para kreditor yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan.²³

c. Undang-Undang Perasuransian

Semangat UU Perasuransian dalam memperjuangkan hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi bisa dirasakan bila membaca dan menelaah ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (4) sebagai berikut:

Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pasal 55 Ayat (2).

²³Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, h. 166.

Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana tabarru' dan Dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.²⁴

Ketentuan diatas menegaskan bahwa pembayaran hak-hak para pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi bahkan ahli warisnya harus dilakukan terlebih dahulu dengan cara menggunakan dana asuransi yang ada bagi perusahaan asuransi/reasuransi konvensional atau reasuransi syariah. Artinya pembayaran hak-hak para pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi harus dilakukan secepatnya tanpa perlu menunggu selesainya proses pemberesan dari kurator atau likuidator.²⁵

d. Tindakan Hukum Bagi Pemegang Polis dalam Melindungi Hak-haknya

UU Kepailitan sepenuhnya belum mengakomodasi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi yang terkait perjanjian asuransi bersifat timbal-balik dengan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. UU Kepailitan yang berlaku sekarang ini masih bersifat mencegah terjadinya pemailitan secara mudah. Namun demikian, tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh seorang pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, walau melalui kurator dalam rangka melindungi hak-haknya, antara lain:²⁶

1) Memohon kepada kurator untuk melakukan tindakan *action pauliana*

Actio pauliana adalah perlindungan hak kreditor dari perbuatan debitur pailit yang merugikan para kreditor. Dalam kaitannya dengan kepailitan, *action pauliana* adalah sesuatu yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 52 Ayat (2) dan (4).

²⁵Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, h. 172.

²⁶Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, h. 173-175.

hukum yang dilakukan debitor sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan, apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum (seperti perikatan-perikatan) yang dilakukan debitor tersebut merugikan kepentingan para kreditor.

2) Meminta verifikasi (pencocokan) piutang

Proses pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk kedalam harta pailit debitor, guna diperinci berapa besarnya piutang yang dapat dibayarkan masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftarpiutang yang diakui atau yang sementara diakui.

3) Mengusahakan perdamaian

Perdamaian dalam kepailitan dilakukan setelah adanya putusan pailit oleh karena itu, inisiatif untuk melakukan perdamaian dalam kepailitan selalu datang dari pihak yang dipailitkan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para kreditornya.

3. Perlindungan Pemegang Polis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, selain ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, di dalam KUHD terdapat pula beberapa peraturan lainnya yang harus diperhatikan, antara lain:²⁷

- a. Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian untuk melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu

²⁷Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, h. 17-27.

perjanjian asuransi. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal.

- b. (2) Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD menafsirkan bahwa perjanjian asuransi juga merupakan perjanjian konsensual, sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua pihak. Dalam hal ini polis hanya merupakan bukti saja. Apabila kedua pihak menutup perjanjian asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah terbentuk.
- c. Pasal 260 dan 261 KUHD yang mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantara makelar. Mengenai perjanjian asuransi yang ditutup melalui perantara dikenal tentang petugas Dinas Luar dan broker asuransi. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan broker asuransi dalam melakukan pelayanan terhadap tertanggung, maka broker dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Secara moralpun broker asuransi merasa berkewajiban untuk menggantikan kerugian yang diderita nasabah atau pihak lain akibat perbuatan broker asuransi.
- d. Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif. Maksudnya, peristiwa dapat dinyatakan batal jika tertanggung atau yang memberikan kuasa telah mengetahui sebelumnya bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Ketentuan tersebut merupakan peraturan menambah sehingga tertanggung atau pemegang polis yang tetap ingin melangsungkan perjanjian dengan kondisi tertentu dapat memperjanjikan lain secara tegas.
- e. Pasal 271 KUHD mengatur mengenai hak penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungannya kepada perusahaan asuransi yang lain. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi berakibat bahwa penanggung bersedia

memberikan ganti rugi atau sejumlah uang apabila terjadi kerugian yang menyimpannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan menutup reasuransi di samping melindungi penanggung pertama juga secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis.

- f. Pemegang polis yang ragu-ragu terhadap kemampuan penanggungnya dapat menutup lagi asuransi dengan penanggung yang lain dengan memperhatikan Pasal 280 KUHD.
- g. Pasal 281 KUHD yang mengatur tentang premi restorno, ditentukan bahwa pemegang polis dapat menuntut kembali premi yang sudah dibayarkan dengan syarat apabila asuransi gugur atau batal, pemegang polis beritikad baik, dan penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian.
- h. Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut hak-haknya maka harus memperhatikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 283 KUHD.

4. Polis Asuransi

Meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi, akan tetapi polis tersebut cukup penting. Hal itu disebabkan dalam polis yang bersangkutan dapat diketahui isi dari perjanjian asuransi yang telah ditutup oleh pemegang polis dan penanggung. Dengan demikian, pemegang polis dapat mengetahui kewajiban dan hak-haknya, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.²⁸

5. Yurisprudensi

Tidak diragukan lagi bahwa yurisprudensi sangat membantu dalam praktek perasuransian dan perkembangannya. Oleh sebab itu sebagai bahan perbandingan, yurisprudensi negeri Belanda dapat dijadikan pedoman. Dalam hubungan dengan kepentingan pemegang polis perlu juga mendapat perhatian, misalnya dalam yurisprudensi di Belanda tanggal 19 Mei 1978 mempertimbangkan bahwa jika penanggung sendiri sudah tahu tentang adanya suatu keadaan yang dapat dipakai untuk menolak klaim, namun tidak memberitahukan kepada tertanggung, maka berdasarkan asas itikad baik, klaim yang bersangkutan tidak boleh ditolak. Seperti yang telah dikemukakan di atas, ketentuan hukum mengenai usaha perasuransian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, situasi ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia semakin marak.²⁹

²⁸Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, h. 28.

²⁹Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi dalam Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, h. 28-29.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Asuransi

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara perusahaan asuransi dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan perusahaan asuransi konvensional, karena akad yang diterapkan perusahaan asuransi syariah, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Akad yang dituangkan dalam perjanjian asuransi secara tertulis dalam bahasa arab disebut *al-wa'du al-maktub*. Secara umum dinamakan polis. Polis asuransi merupakan bukti

tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.³⁰

Dengan memasukkan unsur “nilai-nilai” atau prinsip-prinsip ajaran Islam yang integral dalam kegiatan ekonomi, maka segala aktivitas ekonomi dalam Islam harus berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Kelemahan-kelemahan konsumen dalam berhadapan dengan produsen berkisar pada kelemahan mereka dalam bidang kebodohan atau ketidaktahuan akan barang/jasa, kemudian karena adanya hak yang sah, dalam hal ini kecuali para pemakai barang/jasa yang tidak sah, seperti seorang yang merampas atau mencuri harta seseorang, lalu ia memakainya, maka risiko pemakaian tersebut tidak akan ditanggung oleh pemilik barang, sesuai dengan asas tanggungjawab yang terdapat dalam hukum peradilan Islam, yakni yang sesuai dengan kaidah umum hukum Islam.³¹ Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, peneliti akan menguraikan beberapa hak yang diatur dalam aturan syara’ yang dalam hal ini menuntut dua kewajiban yakni:³²

1. Semua manusia harus menghormati hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak boleh melanggarnya.
2. Pemilik hak itu juga tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena.

³⁰Kuat Ismanto, *Asuransi Syari’ah dalam Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*(Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 7.

³¹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Cet.I; Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 131-132.

³²Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 135-136.

Berikut peneliti akan menguraikan beberapa segi pembahasan tentang hak dalam fiqh Islam yang berhubungan dengan perlindungan konsumen menurut pendapat Muhammad dan Alimin dalam bukunya, yakni :³³

1. Pemilik suatu hak memiliki otoritas untuk menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan hukum.
2. Hak dilindungi syara'. Syara' menetapkan perlindungan dari pelanggaran terhadap hak dengan beberapa cara, yaitu dengan tanggung jawab spiritual atau penetapan hak dengan tuntutan didepan pengadilan.
3. Penggunaan hak harus dengan cara yang sesuai dengan hukum syara'. Pemilik tidak boleh memakai haknya yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada orang lain, baik secara individu ataupun kelompok dan apakah hal itu disengaja atau tidak. Pemilik hak tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena.
4. Hak dapat berpindah tangan dengan sebab tertentu, misalnya hak harta berpindah dengan sebab adanya akad dan hak perwalian akan berpindah dari bapak kepada kakek dengan sebab meninggal dunia.
5. Hak akan berakhir karena sebab yang sudah diatur syara', seperti hak kepemilikan akan berakhir karena akad penjualan dan hak manfaat akan berpindah karena habisnya tempo atau pembatalan akad.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa asuransi Islam berbeda dengan asuransi umum secara mendasar, baik dari segi sudut pandang, bentuk dan sifatnya. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, seringkali tatanan konsep

³³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 137-138.

dasar menguntungkan kedua belah pihak, tapi pada klausul-klausul operasional masih banyak merugikan nasabah tertanggung, karena sifat berat sebelah yang dimiliki dalam perjanjian asuransi. Asuransi dalam Islam menunjukkan bahwa asas-asas perlindungan terhadap nasabah tertanggung dalam asuransi didasarkan pada asas saling bertanggung jawab, asas saling membantu dan asas saling melindungi antar sesama nasabah. Pihak asuransi dalam hal ini harus menjamin pelaksanaan asas-asas perlindungan nasabah tertanggung dijalankan secara baik sesuai dengan konsep syar'iah Islam. Pelaksanaan asas-asas perlindungan nasabah tertanggung pada asuransi tersebut, kaitannya dalam pandangan hukum Islam yakni harus dijalankan sesuai prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari Maghrib (Maisir, gharar, riba), yakni berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi Tidak Benar

Dalam kajian fiqh Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang/jasa danganangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah klasik yang berbunyi, pembelilah yang harus berhati-hati³⁴, tidak pula pelaku usaha yang harus berhati-hati. Akan tetapi didalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan dimana pembeli/pengguna jasa harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam Islam.³⁵

Dalam hal ini, informasi yang diberikan kepada pembeli/pengguna jasa kaitannya dalam hal ini pelaku usaha perasuransian dengan pengguna asuransi (pihak tertanggung) yakni informasi dari masing-masing kedua belah pihak yang melakukan

³⁴Az, Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 55.

³⁵Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 198-199.

perjanjian haruslah jelas dan terhindar dari perkataan atau perbuatan yang sifatnya gharar. Contoh perbuatan gharar adalah memberi informasi tidak jelas pada suatu perusahaan asuransi tertentu untuk melindunginya dari cacatan atau jenisnya.

2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar Tidak Wajar

Seorang konsumen dapat dikatakan tidak mempunyai hak pilih oleh dua sebab:³⁶

- a. Apabila dalam memenuhi kebutuhannya, ia terpaksa oleh suatu ancaman tertentu, seperti akan menyakiti secara jasmani, psikologi atau mengancam untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah sosial ekonomi lainnya.
- b. Apabila konsumen yang dipaksakan oleh mekanisme pasar yang monopolistik.

Dengan demikian, tidak adanya kebebasan konsumen dalam memilih atau menentukan suatu keinginannya dalam bertransaksi atau dalam hal ini asuransi disebut sebagai kebebasan menentukan perjanjian, maka jelas dalam hal ini menurut ketentuan syara' sangat dilarang. Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak bertanggung dan penanggung haruslah menganut asas keseimbangan, dan menganut unsur itikad baik sebagai dasar bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak saling mengandung unsur keterpaksaan antara keduanya.

3. Hak untuk mendapat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa

Hak untuk mendapat perlindungan dengan penyelesaian sengketa harus didukung oleh dua faktor kemudahan yaitu, kemudahan proses beracara ketika konsumen atau dalam hal ini pengguna jasa asuransi (bertanggung) mengajukan tuntutan dan adanya suatu badan hukum pemerintah yang selalu siap sedia untuk membela konsumen dan berdiri sebagai penuntut umum.

³⁶Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 206.

Pada pembahasan tentang tuntutan yang berhubungan dengan hak-hak manusia, apabila dua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai, maka mereka tidak akan dapat memutuskan suatu hukum kecuali dengan melalui peradilan (al-Qadha). Apabila kedua belah pihak yang bersengketa merasa keberatan untuk menyelesaikan perkara mereka didepan hakim pengadilan, maka mereka jug adapt mengupayakan dengan cara tahkim (arbitrase), yaitu melalui seorang penengah yang akan memberi keputusan. Dalam Islam semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap hukum. Pada dasarnya perdamaian sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, selama perdamaian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.³⁷

4. Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan

Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan mempunyai maksud yang sama dengan eksploitasi status sosial atau keunggulan informasi, keadaan terpelajar, dan ekonomis yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad. Ketika Islam mengaramkan riba sebanrnya pada saat yang sama Islam melarang adanya eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain karena secara ekonomis orang-orang yang meminjam dengan membayar riba tersebut dalam keadaan terdesak. Dalam fiqh Islam, masalah penyalahgunaan keadaan juga dimasukkan kedalam bahasan cacat kehendak, yakni tentang akad yang mengandung eksploitasi atau penyalahgunaan keadaan.³⁸

³⁷Az, Nasution, *Konsumen dan Hukum*, h. 58.

³⁸Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 225-226.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam Islam atau kaitannya dalam hal peserta asuransi (pihak tertanggung) tersebut maka pada prinsipnya, yang membedakan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional adalah asuransi yang dikenal dalam hukum Islam menghapuskan unsur ketidakjelasan/ketidakpastian (gharar), unsur spekulasi alias perjudian (maisir) dan unsur bunga uang (riba) dalam kegiatan bisnisnya sehingga peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum asuransi dalam perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan (halal), sebab tidak ada dalil yang melarang keberadaannya. Dalam Islam kita telah diajarkan oleh Allah swt. untuk tidak memakan harta orang lain, sehingga jika kita ingin memakan harta orang lain harus dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam, seperti dari hasil hadiah (hibah), pemberian atau dari hasil transaksi jual beli kemudian kita mendapatkan keuntungan yang saling ridha. Disamping itu segala praktik bisnis yang baru tidak dilarang dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah dan dikelola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, begitu pula dengan asuransi yang pada prinsip dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling menanggung beban. Secara esensial dapat dikatakan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum asuransi seperti prinsip halal, prinsip maslahah, prinsip ibadah, dan prinsip kerjasama tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Prinsip-prinsip itu ditempatkan sebagai syarat sahnya akad termasuk syarat yang diakui, bukan syarat yang bertentangan dengan akad (*mulghah*). Justru keberadaannya itulah sebagai alat untuk menghilangkan praktik-praktik bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti judi, *gharar*, penipuan, riba dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa selama asuransi itu menitik beratkan pada titik komersil atau unit komersil, yakni prinsip yang sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari premi yang dibayarkan, maka jelas hal ini tidak

diperbolehkan (haram) dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi dalam hukum Islam yakni dengan cara memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia yang telah ada dalam aturan syara' yakni pertama, semua manusia harus menghormati hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak boleh melanggarnya. Kedua, pemilik hak itu juga tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena. Perlindungan terhadap pengguna asuransi dalam Islam adalah hal yang sangat dijunjung tinggi, dalam hal tersebut pengguna (nasabah) asuransi diberikan perlindungan terhadap pemalsuan dan informasi yang tidak benar mengenai produk barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar, kemudian perlindungan terhadap hak untuk mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa, dan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan untuk semakin memberikan pemahaman bagi para pelaku perasuransian bahwa asuransi bukanlah hal yang dilarang (haram). Namun demikian, juga harus mempertimbangkan segala aspek teknisnya dengan nilai-nilai keislaman, sehingga lebih bisa diterima oleh umat Islam. Bisnis dalam Islam bukan semata untuk mencapai keuntungan dunia semata, tetapi juga keuntungan akhirat.
2. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas isi perjanjian asuransi, sebaiknya sewaktu melakukan perjanjian asuransi tersebut para pihak harus sepakat atas isi perjanjian yang diperjanjikan, dan isi perjanjian tersebut semestinya

dibacakan dihadapan nasabah pemegang polis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak. Kemudian diharapkan agar masyarakat atau peserta asuransi harus benar-benar cermat dalam mengetahui apa hak dan kewajiban ketika akan, saat, dan setelah mengadakan suatu perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi agar tidak terjadi kerugian dan penyesalan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Abbas, Salim. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Qhardawi, Yusuf. *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Mantik, 2000.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*; Penerjemah: Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2011.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Aspek Hukum Reksadana Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Asikin, Zaenal Dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Aziz, Abdul, Dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herman, Darmawi. *Manajemen Asuransi*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jamil, Fathurrahman. *Metode Ijhtihad Majelis Tarji Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Kadir A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khasmir A. *Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

- Kurniasari, Maya. *Analisis Perbedaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah*. Skripsi. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Cirebon Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Haramnya Riba Dalam Hukum Islam*. Jakrta: Majalah Ombudsman News, Vol. V, Mei 2009.
- _____. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muhammad, Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Menggugat Asuransi Modern*. Cet.I; Jakarta: Lentera Baristama, 1999.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Purba, Radik. *Memahami Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2014.
- Eko Setiawati Junita, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil Di Suatu Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Man Suparman Sastrawidjaja Dan Endang, *Hukum Asuransi Dalam Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Dan Usaha Perasuransian*, Cet. V, Bandung, Alumni, 2013.
- Muhammad Dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Cet.I, Yogyakarta, BPFE, 2004.
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Cet. I, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rkyat Di Indonesia*. Cet. I, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakata, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahman, Nandi. *Asuransi Takaful Keluarga Menurut Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
- _____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
- _____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 246.
- _____. *Ktab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 284.
- _____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Pasal 1 Ayat (1).
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi Asuransi Pada Asuransi Syariah*. Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016.
- Sidiqqi, Nejatullah. *Asuransi Dalam Ekonomi Islam*. Cet.I; Bandung: Pustaka, 2004.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000.
- Sri Redjeki Hartono, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Yang Berwawasan Asas Keseimbangan, Dalam Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Sujarweni V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Dalam Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: GIP, 2004.
- Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam Dalam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.1 Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Uhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Uma, Urbanus. *Asuransi Syariah Kontemporer Dalam Analisis Sejarah, Teori, Dan Praktek Asuransi Di Syariah Di Indonesia*. Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Wardiono, Kelik Dan Khudzaifah Dimyati. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: T.P, 2004.
- Wirasubrata, Burhan. *Menggugat Asuransi Modern Dalam Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Lentera, 2000.
- Wirdyaningsih, Karnaen, Dkk. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Intermasa, 1987.
- Zuhdi, Nazifuq. *Masa'il Fiqhiah*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

RIWAYAT HIDUP



Endang Pujiati, dilahirkan di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 April 1997, anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Sugino B dan Sri Nur Asiah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 199 Sidomukti. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bone-Bone, dan kemudian ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bone-Bone yang diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti di terima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam). Pengalaman organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan AlDebA (Alauddin Debate Association).

